

CLIMATE CHANGE MEDIA MONITORING

NOVEMBER 2021



#COP26

Hasil COP26: Mengecewakan, Kurang Ambisius, Tetapi Lumayan Ada Kemajuan

Hasil COP26, pertemuan para pihak untuk membahas upaya menangani perubahan iklim, membuat banyak kalangan kecewa, tetapi pada saat yang sama diapresiasi. Pimpinan delegasi Indonesia Laksmi Dhewanti usai penutupan acara di Scottish Event Campus, Glasgow, mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengadopsi paket persetujuan COP26 yang dinamai Glasgow Climate Pact.

Proses yang diikuti hampir 200 negara itu menghasilkan tiga naskah penting. Naskah versi pertama yang dirilis pada Rabu (9/11/2021) memberi harapan besar pada berakhirnya ketergantungan pada batubara. Dalam naskah itu, negara-negara diminta "menghapus energi fosil", khususnya batubara. Meski ada kekecewaan, banyak pihak mengapresiasi sejumlah kemajuan yang ada di COP26, di antaranya pembaruan pada Persetujuan Paris terkait Target Kontribusi Nasional (NDC) penurunan emisi dan pasar karbon. Pasal 6 Persetujuan Paris akhirnya diadopsi, yang memberi dasar mekanisme yang lebih jelas tentang pasar karbon untuk transfer penurunan emisi. Indonesia memandang hal ini akan mendukung upaya Indonesia menerapkan instrumen Nilai Ekonomi Karbon yang diatur dalam Perpres 98/2021.

Sumber:

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/14/190300523/hasil-cop26-mengecewakan-kurang-ambisius-tetapi-lumayan-ada-kemajuan?page=all>

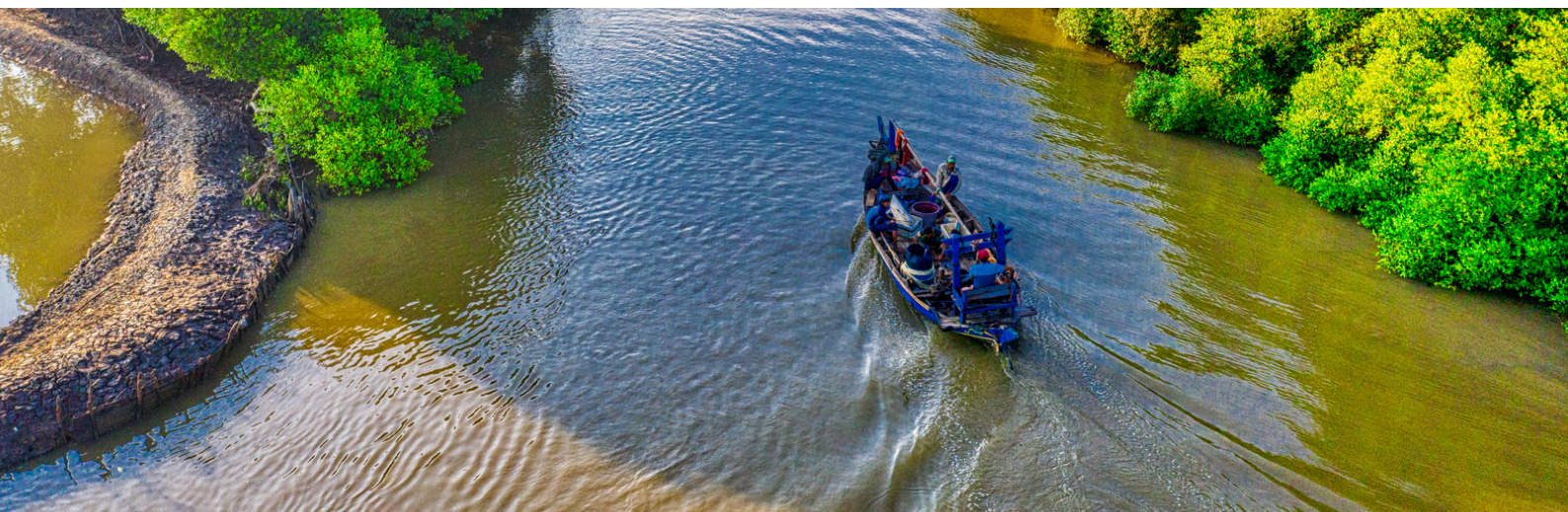
Kesepakatan Article 6 Perjanjian Paris pada COP26: Gembira Tapi Tidak Bahagia

Para negosiator dari perwakilan negara-negara anggota United Nation Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) berhasil menyelesaikan perundingan untuk menyepakati Buku Aturan Paris dalam Konferensi Perubahan Iklim COP26 di Glasgow.

Article 6 dari Perjanjian Paris akhirnya disepakati aturan implementasinya. Article 6 ini pernah terganjal kesepakatan aturan implementasinya saat COP25 di Madrid dan COP24 di Katowice. Article 6 berisi model pembiayaan untuk implementasi mitigasi perubahan iklim, terutama melalui mekanisme pasar dan non-pasar. Article 6 adalah satu-satunya bagian di dalam Perjanjian Paris yang menghubungkan antara negara dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan penentu target pengurangan emisi dengan pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kegiatan secara riil. Article 6 juga yang kemudian menghubungkan kerjasama dan pembiayaan antarnegara dalam pengurangan gas rumah kaca, termasuk juga mekanisme yang akan dipakai. Article 6 terdiri dari 9 pasal utama yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi pembiayaan implementasi mitigasi perubahan iklim dan mampu memberi bagi hasil pada kegiatan implementasi adaptasi.

Sumber:

<https://www.mongabay.co.id/2021/11/17/kesepakatan-article-6-perjanjian-paris-pada-cop26-gembira-tapi-tidak-bahagia/>



#CLIMATEFINANCING

Sri Mulyani Susun Kerangka Fiskal Perubahan Iklim

Kementerian Keuangan tengah menyusun Climate Change Fiscal Framework (CCFF) untuk merumuskan kebijakan fiskal terhadap pendanaan perubahan iklim. Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan jalan lebih luas dalam upaya transisi energi. Seperti diketahui, RI membidik membidik status sebagai negara netral karbon pada 2060.

Kerangka ini diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih menyeluruh dan komprehensif menanggapi isu perubahan iklim. CCFF ini penting untuk memperkuat fungsi kebijakan fiskal dalam pendanaan. Selain itu, CCFF diyakini akan menjadi motor penggerak untuk memobilisasi dana publik dan swasta lebih baik. Lebih lanjut dalam strategi pendanaan ini akan meliputi kebijakan untuk mengoptimalkan dana publik baik bersumber dari domestik maupun internasional. Kerangka ini juga akan menyediakan opsi untuk menyediakan *climate finance governance*.

Sumber:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/44/1470069/sri-mulyani-susun-kerangka-fiskal-perubahan-iklim-ini-bocorannya>

Ekonomi RI Bisa Ciut 3,45 Persen Bila Perubahan Iklim Tak Diatasi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu memproyeksi pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan susut sekitar 0,66 persen sampai 3,45 persen pada 2030 bila dampak perubahan iklim tidak segera dimitigasi. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan agar dampak perubahan iklim bisa segera dimitigasi. Biaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai Rp3.779,63 triliun hingga 2030 mendatang.

Estimasi ini berasal dari pendekatan biaya aksi mitigasi sekitar Rp343,6 triliun per tahun. Estimasi ini juga berasal dari kebutuhan biaya mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor. Kebutuhan biaya terbesar berasal dari sektor energi dan transportasi mencapai Rp3.500 triliun, diikuti limbah sekitar Rp181,4 triliun, kehutanan Rp93,28 triliun, pertanian Rp4,04 triliun, dan IPPU Rp920 miliar.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211129140235-532-727407/ekonomi-ri-bisa-ciut-345-persen-bila-perubahan-iklim-tak-diatasi>

COP26 Gagal Sepakati Dana untuk Atasi Kerusakan Akibat Perubahan Iklim

COP26 di Glasgow, Inggris, gagal membentuk fasilitas pendanaan baru. Dana ini seharusnya ditujukan untuk negara-negara miskin dan berkembang yang rentan dengan pemanasan global. Namun, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara kaya menolaknya. AS dan Australia, khususnya, menghambat kemajuan untuk membentuk pendanaan baru bagi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Kedua negara telah lama menolak wacana negara-negara industri dengan riwayat emisi karbon yang tinggi harus membayar kompensasi kepada negara-negara lain atas kerusakan yang mereka timbulkan.

Sumber:

<https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/6190bc030762a/cop26-gagal-sepakati-dana-untuk-atasi-kerusakan-akibat-perubahan-iklim>

Ekonomi Hijau dan Perubahan Iklim

Pendanaan menjadi hal penting untuk mengatasi perubahan iklim bagi Indonesia. Selain instrumen utama yang berasal dari APBN, kebijakan lain juga telah dilakukan seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan SDG Indonesia One sebagai lembaga untuk mempertemukan berbagai mitra pembangunan, filantropis, individu, dan lembaga multilateral yang tertarik untuk melakukan proyek infrastruktur atau pendanaan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bagi sektor swasta, pemerintah menerbitkan kebijakan fasilitas *tax holiday* dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Bea Masuk untuk industri pioner sektor energi terbarukan.

Sumber:

<https://news.detik.com/kolom/d-5824959/ekonomi-hijau-dan-perubahan-iklim>

#CLIMATEACTION

Langkah Nyata Dharmasraya Kurangi Dampak Perubahan Iklim

Menyadari ancaman perubahan iklim yang kian nyata, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, membuat berbagai program menjaga lingkungan. Mulai dari ikan larangan, pemulihan lahan bekas tambang, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu program yang dilakukan di Dharmasraya adalah mendorong pembentukan “Lubuk Larangan”.

Program ini merupakan kearifan lokal masyarakat. Teknis penerapannya adalah, ada beberapa wilayah sungai yang dilarang aktivitas penangkapan ikan dalam waktu tertentu. Tidak hanya larangan penangkapan ikan, tapi juga dilarang merusak ekosistem sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditetapkan sebagai lubuk larangan.

Sumber:

<https://nasional.tempo.co/read/1530719/langkah-nyatadharmasraya-kurangi-dampak-perubahan-iklim>

Kementan Siapkan Teknologi Mitigasi Hadapi Perubahan Iklim

Kementerian Pertanian menyiapkan teknologi 4.0 untuk menyiapkan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim. Teknologi ini dikembangkan menghindari risiko kerugian dalam budidaya pertanian yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti gagal tanam dan serangan hama. Kebutuhan teknologi dalam menghadapi perubahan iklim dapat berupa prediksi cuaca, jumlah air, kondisi tanah dengan pemasangan sensor, waktu pemupukan yang tepat dan jumlah pemupukan, serta cara menghadapi dan menangani serangan hama. Informasi yang didapat melalui sensor tersebut harus dapat dipahami oleh petani dan dapat diakses secara realtime. Selain digunakan pada sisi budidaya, teknologi *smart farming* bisa diterapkan juga sebagai penduga emisi gas rumah kaca.

Sumber:

<https://www.republika.co.id/berita/r2t66n349/kementan-siapkan-teknologi-mitigasi-hadapi-perubahan-iklim>



#CLIMATEACTION

Jokowi Tunjukkan Keseriusan Indonesia Tangani Perubahan Iklim kepada Dubes

Presiden Joko Widodo meninjau Persemaian Rumpin, Bogor, yang telah selesai proses konstruksi dan segera beroperasi memproduksi bibit dengan kapasitas 12 juta bibit per tahun. Persemaian ini menjadi salah satu bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

Hadir bersama Presiden Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Pilet, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen. Presiden berharap dengan membangun pusat persemaian seperti di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di sisi hulu. Presiden menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan.

Sumber:

<https://www.suara.com/news/2021/11/20/124505/jokowi-tunjukkan-keseriusan-indonesia-tangani-perubahan-iklim-kepada-dubes?page=all>

Remaja Asal Gresik Ini Jadi Aktivis Iklim Sejak SD

Nama Greta Thunberg sebagai aktivis iklim barangkali tak lagi asing di telinga. Namun, siapa sangka Indonesia juga mempunyai sosok remaja peduli lingkungan seperti Greta. Dia adalah Aeshnina Azzahra Aqilani. Pada forum tingkat tinggi yang membahas soal perubahan iklim, Conference of Parties ke-26 atau COP26 pada 1-12 November 2021 lalu, Nina turut diundang dalam acara sampingan penayangan film dokumenter yang menceritakan soal dirinya. Nina, siswa kelas 9 SMPN 12 Gresik, melakukan kegiatan peduli lingkungan sejak masih kecil, salah satunya kesadaran untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.

Sumber:

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5831273/remaja-asal-gresik-ini-jadi-aktivis-iklim-sejak-sd-kini-jadi-sorotan-di-eropa>



#CLIMATEEMERGENCY

Akibat Perubahan Iklim, Pulau Kecil Sepanjang Aceh-Papua Nyaris Tenggelam

Indonesia patut mengkhawatirkan dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan pulau-pulau kecil. Penelitian menunjukkan muka laut telah naik sekitar 21-24 cm sejak tahun 1880 akibat mencairnya es di kawasan Arktik dan Antartika sebagai dampak krisis iklim. Sedangkan temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menaksir sekitar 115 pulau kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam. Ratusan pulau berpotensi terkena dampak berlipat akibat kenaikan permukaan air laut sekaligus penurunan muka tanah. Data lainnya dari lembaga riset dan advokasi Climate Central menunjukkan, kenaikan air laut setinggi satu meter saja akan menenggelamkan sebagian wilayah pantai utara Jawa. Kenaikan muka air laut dapat menimbulkan gelombang yang lebih besar sehingga "mendesain ulang" garis pantai. Lapisan sedimen di beberapa tempat di daratan juga dapat luruh ke laut sehingga menimbulkan erosi dan banjir di daerah lainnya.

Sumber:

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/02/120000523/akibat-perubahan-iklim-pulau-kecil-sepanjang-aceh-papua-nyaris-tenggelam?page=all>

Studi Baru Ungkap Tanaman Pangan Bakal Terdampak Perubahan Iklim

Studi baru dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan, pada akhir dekade ini tanaman pangan bakal terdampak perubahan iklim. Hal tersebut akan memengaruhi ketahanan pangan secara global. Salah satu tanaman yang bakal terdampak adalah jagung.

Berdasarkan studi baru ini, pada awal tahun 2030, hasil panen jagung akan turun hampir seperempatnya jika pemanasan global berlanjut pada kecepatan seperti saat ini. Kesimpulan ini didapat ilmuwan NASA setelah melakukan penelitian menggunakan pemodelan komputer untuk melihat kenaikan suhu di seluruh dunia, perubahan pola hujan dan meningkatnya konsentrasi gas kaca di atmosfer yang memengaruhi fotosintesis. Model komputer kemudian menunjukkan bahwa banyak daerah tropis yang saat ini mengandalkan produksi jagung menjadi terlalu panas untuk tempat tanaman berkembang.

Sumber:

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/10/110000123/studi-baru-ungkap-tanaman-pangan-bakal-terdampak-perubahan-iklim?page=all>

Atmosfer Meningkat karena Perubahan Iklim, Ini Dampaknya untuk Pesawat

Studi baru menunjukkan, atmosfer bumi meningkat karena perubahan iklim. Ahli berpendapat, hal ini akan memengaruhi dunia penerbangan. Dilansir dari Live Science, pengukuran balon cuaca yang dilakukan di belahan bumi utara selama 40 tahun terakhir mengungkapkan bahwa lapisan terendah bumi (troposfer) mengembang ke atas dengan kecepatan kira-kira 50 meter per dekade karena perubahan iklim. Udara di atmosfer mengembang saat panas dan menyusut saat dingin, sehingga batas atas troposfer yang disebut tropopause, secara alami menyusut dan mengembang seiring perubahan musim.

Sumber:

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/15/080100323/atmosfer-meningkat-karena-perubahan-iklim-ini-dampaknya-untuk-pesawat?page=all>

Studi: Perubahan Iklim Jadi Penyebab Perceraian Burung Albatros

Para peneliti baru saja menemukan bahwa perubahan iklim juga memengaruhi kehidupan albatros, burung laut terbesar di dunia. Hasil penelitian mereka menunjukkan jumlah perceraian albatros meningkat drastis, padahal albatros dikenal setia. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Royal Society mengamati 15.500 pasangan kawin burung albatros di Kepulauan Falkland selama 15 tahun. Sepanjang durasi penelitian, peningkatan suhu air laut yang membuat air menjadi lebih hangat, ternyata juga meningkatkan angka perceraian albatros menjadi 8%. Penelitian tersebut menunjukkan "perceraian yang didorong oleh kondisi lingkungan mungkin merupakan konsekuensi yang diabaikan" dari perubahan iklim.

Sumber:

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59428080>
